

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jendral,
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat jendral dan badan keahlian,
- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- e. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,

- g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>38</sup>.

Struktur Sekjen DPR RI Seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekjen DPR RI Tahun 2016

Pada struktur organisasi Sekjen DPR RI terdiri dari :

1. Deputi Bidang Administrasi
2. Deputi Bidang Persidangan
3. Inspektorat utama

#### 4.2. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.

<sup>38</sup> <https://www.dpr.go.id/setjen/tentang>, diunduh pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 13.00

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Deputi bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis deputi bidang administrasi,
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan dibidang hukum, perencanaan, pengorganisasian, keanggotaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggan di lingkungan DPR RI, Sekjen, dan badan keahlian,
- c. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekjen dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekjen<sup>39</sup>.

#### 4.3. Deputi Bidang Persidangan

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Deputi Bidang Persidangan memiliki fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis deputi bidang persidangan,
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan,
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen,
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan hubungan masyarakat dan pemberitaan ,
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekjen dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekjen<sup>40</sup>.

Deputi Bidang Persidangan terdiri atas:

---

<sup>39</sup> Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneia Pasal 8 Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal 23

- a. Biro Persidangan I
- b. Biro Persidangan II
- c. Biro Kerjasama Antar Parlemen
- d. Biro Kesekretariatan Pimpinan
- e. Biro Pemberitaan Parlemen

Humas DPR RI dalam melakukan pemberitaan, menjadi tanggung jawab Biro Pemberitaan Parlemen. Adapun tugas dan fungsi biro pemberitaan parlemen yaitu:

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud biro pemberitaan parlemen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen,
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen,
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen,
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen,
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan,
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan,
- g. penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website,
- h. penyelenggaraan hubungan masyarakat,
- i. penyelenggaraan televisi dan radio,
- j. penyelenggaraan urusan penerbitan,
- k. penyelenggaraan kehumasan ,
- l. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan,
- m. penyusunan laporan kinerja biro pemberitaan parlemen dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada deputi bidang persidangan<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal 45

Biro Pemberitaan Parlemen terdiri dari:

- a. Bagian media cetak dan media sosial,
- b. Bagian hubungan masyarakat,
- c. Bagian televisi dan radio paelemen,
- d. Bagian penerbitan.

#### 4.4. Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Bagian Media Cetak dan Media Sosial mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan *website*, serta melaksanakan analisis media. Adapun fungsi bagian media cetak dan media sosial yaitu:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial,
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak media sosial, website, dan analisis media,
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media,
- d. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak,
- e. pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website,
- f. pelaksanaan analisis media,
- g. pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial,
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen<sup>42</sup>.

Sekjen DPR RI memiliki turunan yaitu deputy bidang administrasi dan deputy bidang persidangan. Deputy persidangan memiliki fungsi menyiapkan rumusan bagian humas dan pemberitaan parlemen. Untuk menjalankan fungsinya, deputy persidangan terdapat biro yang berada didalamnya antara lain biro pemberitaan yang berfungsi mengatur sebuah pemberitaan yang berada di parlemen. Selain itu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hal 46

terdapat berbagai produk humas yang ada diwebsite *dpr.go.id* terdapat 4 produk yang ditawarkan oleh bagian pemberitaan. Produk tersebut ialah:

1. Tv Parlemen : Tv parlemen memuat berbagai berita yang dimuat khusus didalam sebuah video dan dikelola oleh bagian pemberitaan parlemen

Tabel 4.1 Contoh produk Tv Parlemen

NO	EDISI	COVER	TEMA	JUDUL
1	Kamis, 27 Mei 2021		Nakes terinfeksi varian baru covid-19	Suara parlemen petang

Sumber : Youtube DPR RI

Tv Parlemen merupakan produk humas yang ditawarkan kepada penonton yang berisikan berita yang terjadi di DPR. Penonton dapat mengaksesnya melalui web resmi *dpr.go.id* atau melalui streaming Youtube dan melalui tv swasta.

2. Majalah parlementaria: membahas mengenai berita yang terjadi di DPR RI, majalah parlementaria terbit setiap bulan dan ada 12 edisi setiap tahunnya

Tabel 4.2 Contoh produk Majalah Parlementaria

NO	EDISI	COVER	TEMA	JUDUL
1	65		Membahas APBN di tahun 2008	APBN 2008 Rentan Ketidakpastian

2	196		Membahas mengenai radikalisme dan ekstrimisme	Basmi Sinyal Terorisme
---	-----	---	---	------------------------

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 65 dan 196  
Majalah Parlementaria merupakan produk humas yang ditawarkan kepada masyarakat yang berisikan berita mengenai DPR yang terbit setiap bulannya. Pembaca dapat mendapatkan majalah ini melalui web resmi *dpr.go.id* atau bisa didapatkan di tempat publik misalnya stasiun dan bandara.

- Bulletin parlementaria: membahas mengenai kejadian yang berada di DPR dan terbit setiap minggu

Tabel 4.3 Contoh produk Bulletin Parlementaria

NO	EDISI	COVER	TEMA	JUDUL
1	1150		Membahas mengenai perubahan UU No 21 tahun 2001 tentang otsus	Otsus tingkatkan kesejahteraan rakyat papua dan papua barat

Sumber : Bulletin Parlementaria edisi 1150  
Bulletin Parlementaria merupakan produk humas DPR yang ditawarkan kepada masyarakat yang berisikan berita ter-update karena bulletin ini terbit setiap minggunya. Pembaca dapat mengakses secara *online* melalui web resmi *dpr.go.id* atau melalui *offline* yang berada ditempat publik.

4. Radio parlemen: Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, kebijakan, kegiatan dan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar.

Tabel 4.4 Contoh produk Radio Parlemen

NO	EDISI	COVER	TEMA	JUDUL
1				

Sumber : Youtube DPR RI

Radio Parlemen merupakan produk humas yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menjadi alternatif diantara beberapa produk humas yang ditawarkan. Radio Parlemen dapat diakses melalui online *dpr.go.id*.

#### 4.5 Rubrik dan Judul Majalah Parlementaria

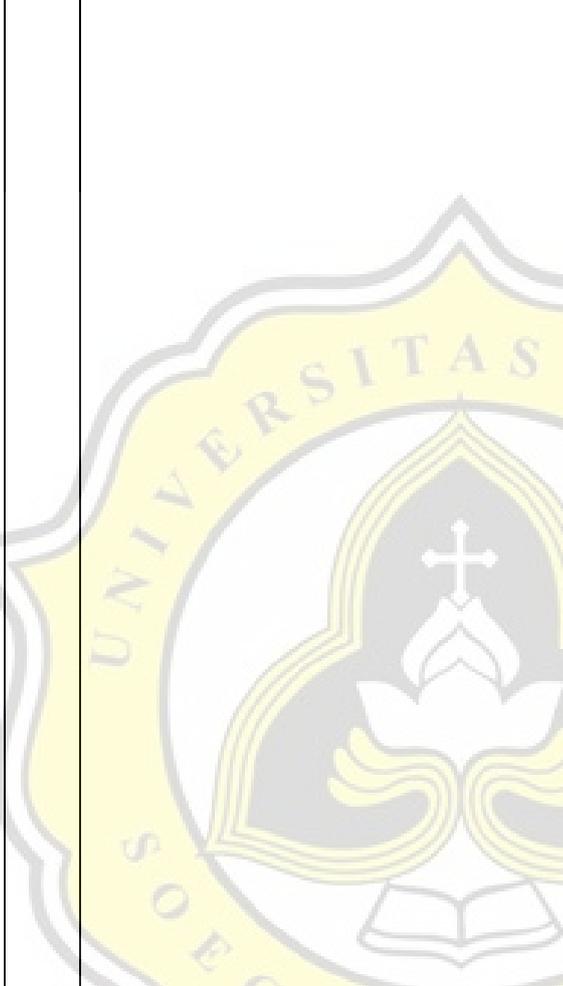
Majalah parlementaria terbitan tahun 2015 edisi 129 memiliki rubrik dan judul yang membahas mengenai kasus Direktur Utama Pelindo II Rj Lino. Berikut ialah rekapan rubrik dan judul pada majalah parlementaria edisi 129 :

Tabel 4.5 Rekapitulasi Rubrik dan Judul

NO	Rubrik/Halaman/Judul	Gambar
1	Prolog/ 6-7/ Benang Kusut Pelindo II	



4 Laporan Utama/ 10-11/ kerja Perdana Panja Pelindo II



**LAPORAN UTAMA**

# KERJA PERDANA PANJA PELINDO II

Rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Pelindo II sudah digelar. Panja dibentuk Komisi I dan II yang bertugas mengadani Direktori Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Panja menilai ada pelanggaran hukum di balik perampangan korupsi pengelolaan terminal pelatam di Pelabuhan Tanjung Priuk.

Panja menilai ada pelanggaran dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Dia mengemukakan UU No. 17/2003 tentang Pelindo Pasal 144 mengemukakan agar semua kerja sama kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh entitas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT Pelindo II hanya operator pelabuhan. Akibatnya, Dirut Pelindo II yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang juga terdapat.

Tak kurang dari tiga Menteri Perhubungan sudah mengganggukan Dirut Pelindo II dengan berkorban surat anal perampangan kontrak yang perampangan. Ketiga menteri itu adalah Freddy Simbolon, E. Mangunandjaja, dan Hani Soeman Soeman. Bahkan, Menteri BUMN Rizal Damono juga sudah mengganggukan Dirut Pelindo II untuk memamerkan hak mudi daya insinuator dari negeri sendiri dalam mengelola pelabuhan, terdapat diberikan kepada asing.

Lino sendiri di hadapan Panja Komisi VI menjawab bahwa langkahnya memperpanjang kontrak kontrak itu sudah dikonsultasikan kepada Ketua Muda Pengadilan Tinggi Tapanuli Tengah, Ronggong H. Bahuk, katanya, sudah mengganggukan kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN dalam suratnya menyetujui amaran komisi sesuai UU

**KRONOLOGI PERISTIWA YANG MELIHMUTI PELINDO II**

**17 JUNI 2015**  
Presiden Jokowi menunjuk Ronggong H. Bahuk sebagai Ketua Komisi VI DPR.

**12 AGUSTUS 2015**  
Presiden Jokowi menunjuk Ronggong H. Bahuk sebagai Ketua Komisi VI DPR.

**24 AGUSTUS 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**24 AGUSTUS 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**24 AGUSTUS 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**4 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**15 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**10 |** 10-11/17. JULI 2015 | **PELINDO II**

**10/17/2015** Bahuk, wakil ketua komisi, menilai ada pelanggaran hukum yang dilakukan Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Dia mengemukakan UU No. 17/2003 tentang Pelindo Pasal 144 mengemukakan agar semua kerja sama kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh entitas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT Pelindo II hanya operator pelabuhan. Akibatnya, Dirut Pelindo II yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang juga terdapat.

**16 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**18 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**19 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**20 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**21 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**22 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**23 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**24 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**25 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**26 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**27 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**28 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**29 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**30 SEPTEMBER 2015**  
Rapat perdana Panja Pelindo II digelar di Gedung PT Pelindo II, Jakarta.

**1 |** 10-11/17. JULI 2015 | **PELINDO II**

5 Laporan Utama/ 12-13/ Ada Disharmoni di Pelindo II

Ada disharmoni di Pelindo II. Rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Pelindo II sudah digelar. Panja dibentuk Komisi I dan II yang bertugas mengadani Direktori Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Panja menilai ada pelanggaran hukum di balik perampangan korupsi pengelolaan terminal pelatam di Pelabuhan Tanjung Priuk.

Panja menilai ada pelanggaran dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Dia mengemukakan UU No. 17/2003 tentang Pelindo Pasal 144 mengemukakan agar semua kerja sama kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh entitas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT Pelindo II hanya operator pelabuhan. Akibatnya, Dirut Pelindo II yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang juga terdapat.

Tak kurang dari tiga Menteri Perhubungan sudah mengganggukan Dirut Pelindo II dengan berkorban surat anal perampangan kontrak yang perampangan. Ketiga menteri itu adalah Freddy Simbolon, E. Mangunandjaja, dan Hani Soeman Soeman. Bahkan, Menteri BUMN Rizal Damono juga sudah mengganggukan Dirut Pelindo II untuk memamerkan hak mudi daya insinuator dari negeri sendiri dalam mengelola pelabuhan, terdapat diberikan kepada asing.

Lino sendiri di hadapan Panja Komisi VI menjawab bahwa langkahnya memperpanjang kontrak kontrak itu sudah dikonsultasikan kepada Ketua Muda Pengadilan Tinggi Tapanuli Tengah, Ronggong H. Bahuk, katanya, sudah mengganggukan kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN dalam suratnya menyetujui amaran komisi sesuai UU

**LAPORAN UTAMA**

# ADA DISHARMONI DI PELINDO II

Rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Pelindo II sudah digelar. Panja dibentuk Komisi I dan II yang bertugas mengadani Direktori Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Panja menilai ada pelanggaran hukum di balik perampangan korupsi pengelolaan terminal pelatam di Pelabuhan Tanjung Priuk.

Panja menilai ada pelanggaran dengan pelanggaran hukum yang dilakukan Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Dia mengemukakan UU No. 17/2003 tentang Pelindo Pasal 144 mengemukakan agar semua kerja sama kontrak dengan pihak ketiga dilakukan oleh entitas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT Pelindo II hanya operator pelabuhan. Akibatnya, Dirut Pelindo II yang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga yang juga terdapat.

Tak kurang dari tiga Menteri Perhubungan sudah mengganggukan Dirut Pelindo II dengan berkorban surat anal perampangan kontrak yang perampangan. Ketiga menteri itu adalah Freddy Simbolon, E. Mangunandjaja, dan Hani Soeman Soeman. Bahkan, Menteri BUMN Rizal Damono juga sudah mengganggukan Dirut Pelindo II untuk memamerkan hak mudi daya insinuator dari negeri sendiri dalam mengelola pelabuhan, terdapat diberikan kepada asing.

Lino sendiri di hadapan Panja Komisi VI menjawab bahwa langkahnya memperpanjang kontrak kontrak itu sudah dikonsultasikan kepada Ketua Muda Pengadilan Tinggi Tapanuli Tengah, Ronggong H. Bahuk, katanya, sudah mengganggukan kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN dalam suratnya menyetujui amaran komisi sesuai UU









Peneliti mengamati melalui majalah parlementaria edisi 129 bahwa kasus Pelindo II merupakan kasus perpanjangan kontrak Pelindo II dengan mitranya. Anggota DPR RI Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengamati bahwa Pelindo II tidak memenuhi syarat Undang-Undang yang berlaku dalam melakukan perpanjangan kontraknya. Akhirnya, anggota komisi III DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDIP dan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengamati jalannya kasus di Pelindo II.

#### 4.6 Komunikator Politik

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Anggota Pansus DPR RI salah satunya di majalah Parlementaria. Dalam majalah tersebut, Anggota Pansus

menyampaikan pesan-pesan politik melalui berita yang ada pada setiap edisinya. Anggota Pansus menggunakan berita tersebut tujuannya untuk memberikan informasi dan menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai kasus direktur utama Rj Lino yang terjerat kasus perpanjangan kontrak dengan mitranya. Anggota Pansus DPR RI memberikan pesan bahwa kasus yang menimpa direktur utama Pelindo II ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Adapun anggota pansus Pelindo II sebanyak 30 orang terdiri dari:

Tabel 4.6 Nama Anggota Pansus Pelindo II

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	Sukur Nababan	F-PDIP	Komisi V, Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan.
2	Herman Heri	F-PDIP	Komisi III, Hukum, HAM, dan keamanan
3	Masinton Pasaribu	F-PDIP	Komisi III, Hukum, HAM, dan keamanan
4	Junimar Girsang	F-PDIP	Komisi III, Hukum, HAM, dan keamanan
5	Andreas Eddy Susetyo	F-PDIP	komisi XI, keuangan, perbankan, perencanaan, dan pengawasan pembangunan
6	Rieke Diah Pitaloka	F-PDIP	komisi VI, ketua DPP PDIP bidang pemberbadaayn perempuan
7	Bambang Soesatyo	F-Golkar	Komisi III
8	Adies Kadir	F-Golkar	Komisi III
9	Budi Supriyanto	-	-
10	Kahar Muzakir	F-Golkar	Komisi III
11	Edison Betaubun	F-Golkar	Komisi IX, permasalahan tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, serta Kesehatan.
12	Desmond J Mahesa	F-Gerindra	Komisi III
13	Moh. Nizar Zahro	F-Gerindra	Ketua DPD APDESI Jatim
14	Suir Syam	F-Gerindra	komisi IX- membidangi tenaga kerja, transmigrasi, Kesehatan, kependudukan.
15	Moh. Hekal	F-Gerindra	komisi VI, komisaris PT Tanah laut

16	Wahyu Sanjaya	F-Demokrat	Komisi II
17	I Putu Sudiartana	F-Demokrat	Komisi III, Bendahara Umum
18	Anton Sukartono	F-Demokrat	Komisi X, Bendahara Fraksi
19	Daeng Muhammad	F-PAN	Komisi III, Hukum, HAM, dan keamanan
20	Teguh Juwarno	F-PAN	-
21	Nasril Bahar	F-PAN	Komisi VI
22	M. Nasim Khan	F-PKB	Komisi VI, perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi
23	Daniel Johan	F-PKB	Komisi IV
24	Abubakar Alhabsy	F-PKS	Komisi III, Hukum, HAM, dan Keamanan
25	Refrizal	F-PKS	Komisi VI
26	Epyardi Asda	F-PPP	Komisi V, Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
27	Arsul sani/ Moh. Iqbal	F-PPP	Komisi III, Anggota Pansus RUU terorisme
28	Taufiqulhadi	F-Nasdem	Komisi X
29	Irma Suryani	F-Nasdem	Komisi IX
30	Nurdin Tampubolon	F-hanura	Komisi III

Sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/314081/ini-anggota-dewan-yang-akan-gebuk-rj-lino-di-pansus-pelindo-ii#!>

Hasil data diatas penulis menemukan bahwa tidak semua anggota pansus menyampaikan komunikasi politiknya di Majalah Parlementaria peneliti melihat hanya komisi III, VI, dan IX yang menjadi sorotan. Karena anggota komisi III, VI, dan IX mempunyai tugas dalam pengawasan. Berikut hasil rekapan anggota pansus Pelindo II yang berpendapat di majalah Parlementaria edisi 129 Tahun 2015 :

Tabel 4.7 komunikator Politik Anggota Pansus Pelindo II

NO	Komunikator Politik	Judul	Hal
1	Irma Suryani	1. Benang Kusut Pelindo II 2. Direksi Pelindo II tak Hormati komisi IX	6 16

2	Rieke Diah Pitaloka	Benang Kusut Pelindo II	6
3	Desmon J Mahesa	Benang Kusut Pelindo II	6
4	Azis Syamsudin	Benang Kusut Pelindo II	6
5	Teguh Juwarno	Benang Kusut Pelindo II	6
6	Edison Betaubun	Direksi Pelindo II tak Hormati Komisi IX	16
7	Suir Syam	Direksi Pelindo II tak Hormati Komisi IX	16

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 129

Tabel diatas penulis menemukan bahwa terdapat 7 anggota Pansus yang berbicara mengenai kasus Pelindo II. Anggota komisi IX yang membidangi Kesehatan dan ketenagakerjaan yang selalu muncul sebagai komunikator politik untuk berpendapat, karena Komisi IX sebagai komisi yang berperan sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang melakukan inspeksi langsung ke Tanjung Priok Jakarta Utara terhadap kasus perpanjangan kontrak Pelindo II dengan mitranya. Ternyata tidak hanya anggota Pansus Pelindo II yang berbicara Pansus tetapi ada anggota DPR RI selain Pansus yang berbicara membahas kasus Pelindo II ini. Berikut daftar nama Anggota DPR RI yang berbicara mengenai Pansus:

Tabel 4.8 Anggota DPR RI berbicara membahas kasus Pelindo II

No	Komunikator Politik	Judul	Halaman
1	Azis Syamsudin	Benang Kusut Pelindo	6
2	Achmad Hafisz Tohir	Benang Kusut Pelindo	6
3	Heri Gunawan	Benang Kusut Pelindo	7
4	Wilgo Zainar	Benang Kusut Pelindo	7
5	Mohammad Hatta	Benang Kusut Pelindo	7
6	Irma suryani	Benang Kusut Pelindo	7
7	Fadli Zon	Menuju Pansus Pelindo	8
8	Agus Hermanto	Kita tunggu hasil kerja Panja	9
9	1. Achmad Hafidz Tohir 2. Heri Gunawan	Kerja Perdana Panja Pelindo II	10-11
10	Azam azman	Ada Disharmoni di Pelindo II	12-13
11	Bambang Haryo Soekartono	Tak perlu takut tanpa keterlibatan Asing	14
12	Sartono Hutomo	Infrastruktur Pelabuhan Indonesia Masih Tertinggal	15
13	Irma Suryani	Direksi Pelindo II tak Hormati Komisi IX	16-17
14	1. Wilgo Zainar 2. Mohammad Hatta	Perpanjangan konsesi JICT perlu Dipertanyakan	18-19

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 129

Tabel 4.8 terlihat bahwa Kasus Pelindo II ini tidak hanya disoroti oleh anggota Pansus saja, tetapi anggota DPR RI selain pansus juga membahas atau berbicara hal serupa mengenai kasus Pelindo II tersebut.

1. Azis Syamsudin : Azis Syamsudin memiliki kedudukan sebagai ketua komisi III DPR RI bidang politik dan keamanan. Azis Syamsudin merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Ketua komisi III ini berbicara mengenai pansus karena komisi III memiliki tugas untuk mengawasi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan negara.
2. Achmad Hafisz Tohir : memiliki kedudukan sebagai ketua komisi VI DPR RI. Achmad Hafisz Tohir merupakan anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Komisi VI DPR RI memiliki tugas Bersama BPK mengawasi kasus yang terjadi di Pelindo II.
3. Heri Gunawan : Heri Gunawan kedudukannya dalam anggota DPR RI sebagai wakil ketua komisi VI fraksi Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra).
4. Wilgo Zainar : memiliki kedudukan sebagai anggota komisi IX DPR RI dari fraksi Gerindra. Wilgo Zainar Bersama komisi IX berbicara mengenai kasus Pelindo karena komisi IX memiliki fungsi membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.
5. Mohammad Hatta : memiliki kedudukan sebagai anggota komisi IX DPR RI. Mohammad Hatta merupakan anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Mohammad Hatta sebagai anggota komisi IX memiliki tugas dalam mengawasi kasus temuan BPK yang terjadi di Pelindo II.
6. Irma Suryani : memiliki kedudukan sebagai anggota komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, Kesehatan. Daerah pilihannya Sumatera Selatan II. Irma Suryani merupakan anggota dari fraksi Nasdem. Irma suryani sebagai anggota komisi IX yang mengkritisi kasus Pelindo II ini. Irma Suryani Bersama komisi IX lainnya juga masuk menjadi anggota pansus Pelindo II.
7. Fadli Zon : memiliki kedudukan sebagai wakil ketua DPR RI fraksi Gerindra. Fadli Zon membahas mengenai kasus Pelindo II karena memiliki kepentingan atas kasus yang menimpa DPR RI. Dalam temuannya, penulis

melihat bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Fadli Zon lebih berfokus kepada komisi VI yang menyorot soal korporasi dan konsesi, beserta komisi IX yang membahas mengenai tenaga kerjanya.

8. Agus Hermanto : Agus Hermanto memiliki kedudukan sebagai wakil ketua DPR RI fraksi partai demokrat daerah pilihan Jawa Tengah. Agus Hermanto juga berpendapat mengenai kasus Pelindo II karena kepentingannya sebagai wakil ketua DPR RI.
9. Azam Azman : merupakan wakil ketua komisi VI DPR RI bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, standarisasi nasional. Azam Azman berasal dari fraksi Demokrat. Azam Azman berbicara mengenai pansus karena tugas komisi VI Bersama BPK turut mengawasi temuan kasus yang terjadi di Pelindo II.
10. Bambang Haryo Soekartono : merupakan anggota komisi VI DPR RI fraksi Gerindra dan daerah pilihannya di Jawa Timur I Bambang Haryo membidangi BUMN, Koperasi, Investasi, Perdagangan, dan perindustrian. Bambang Haryo beserta anggota komisi VI lainnya melihat dan mengkritisi temuan BPK atas kasus yang menimpa direktur utama Pelindo II.
11. Sartono Hutomo : merupakan anggota komisi VI DPR RI dari fraksi demokrat. Sartono Hutomo berpendapat mengenai kasus Pelindo II karena tugas komisi VI mengawasi temuan kasus Pelindo II yang dilakukan oleh BPK.

Data diatas Peneliti melihat bahwa terdapat anggota DPR selain pansus ikut berpendapat mengenai kasus di Pelindo II. Peneliti melihat bahwa ketua dan wakil ketua DPR yang sering melakukan komunikasi politiknya di majalah parlementaria karena ketua dan wakil ketua sebagai kedudukan jabatan tertinggi di DPR RI selain ketua dan wakil ketua DPR RI, anggota komisi VI dan komisi IX juga berpendapat untuk mengkritisi kasus Direktur Utama Pelindo II ini. adapun tugas komisi VI bidang pengawasan yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI,
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI,
3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI,
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah,
5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD,
6. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.<sup>43</sup>

Selain tugas yang dilakukan anggota komisi VI, anggota komisi IX memiliki tugas yang sama yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI,
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI,
3. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI,
4. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah,
5. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Diunduh dalam artikel tentang komisi VI <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VI>

<sup>44</sup> Diunduh dalam artikel tentang komisi IX <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX>

Peneliti menemukan bahwa tugas komisi VI dan IX DPR RI memiliki kesamaan dalam hal pengawasan terhadap kasus yang sedang diamati oleh BPK. Sehingga anggota DPR RI selain pansus yang masuk di komisi VI dan IX ikut berpendapat dan mengkritisi jalannya kasus Direktur Utama Pelindo II. Dalam sebuah komunikasi politik erat kaitannya dengan aktor politik peranan aktor politik sangat penting guna menghimpun kekuatan politik suatu partai, karena biasanya sosok seorang tokoh politik yang sudah tergambar bagus citranya dimasyarakat cenderung akan mudah dimobilisasi oleh seorang aktor politik.<sup>45</sup> Dalam komunikasi politik pada majalah parlementaria edisi September 2015 yang berjudul Benang Kusut Pelindo II aktor politiknya ialah anggota DPR RI yang berbicara pansus Pelindo II. Karena yang digunakan adalah majalah parlementaria yang membahas kasus Pelindo II, supaya masyarakat juga hanya berfokus kepada kasus yang dilakukan oleh Rj Lino selaku direktur utama Pelindo II.

#### 4.7 Pesan Politik

Proses penyampaian pesan yang digunakan anggota Pansus DPR RI adalah melalui redaktur media cetak. Majalah Parlementaria dikelola oleh tim redaktur media cetak sebelum naskah dimuat di majalah tersebut. Anggota Pansus DPR RI memberikan pesan bahwa kasus yang menimpa direktur utama Pelindo II ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Anggota Pansus DPR RI menggunakan foto, tabel, dan naskah sebagai simbol penyampaian pesan kepada masyarakat. Pada komunikasi politik yang terjadi pada majalah Parlementaria terjadi komunikasi satu arah karena Anggota Pansus melakukan komunikasi politik melalui naskah yang dipaparkan saja dan masyarakat hanya bisa membaca dan memahaminya saja.

#### 4.8 Strategi komunikasi politik menggunakan media

---

<sup>45</sup> Abd. Rahman, 2015, “ *Aktor Politik Sebagai Salah Satu Kekuatan Politik*”, dalam Jurnal komunikasi, Vol 1, No 1, Februari 2015:(Makassar: Universitas Hasanuddin), hal 1-4

Strategi komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Arifin<sup>46</sup>, agar dapat menghasilkan komunikasi yang efektif dilakukan melalui mengenal khalayak, penyusunan pesan, penentuan Teknik penyampaian pesan, dan penggunaan media.

a. Mengetahui khalayak

Anggota DPR RI dalam mengetahui dan memahami khalayak memerlukan cara segmentasi, *targeting*, *positioning* politik. Segmentasi yang dituju oleh anggota DPR RI adalah masyarakat yang membaca dan mengikuti kasus Pelindo II. Target yang dituju oleh anggota DPR RI adalah pembaca atau masyarakat yang mengkritisi kasus Pelindo II. *Positioningnya* adalah memberikan informasi mengenai kinerja panitia kerja menuju panitia khusus dalam menangani kasus Pelindo II.

b. Penyusunan pesan

Penyusunan pesan dalam komunikasi politik anggota DPR RI seperti pada judul Benang kusut Pelindo II sampai dengan Pelindo dan silang sengkaret Pelabuhan di Indonesia. dalam Menyusun pesan tersebut Anggota DPR RI memberikan pesan-pesan secara langsung yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Pesan Politik Anggota DPR tentang kasus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Azis Syamsudin	Benang Kusut Pelindo II	“Tujuan pembentukan Pansus untuk mengetahui Praktik pelanggaran hukum yang terjadi di Pelindo II sekaligus mengawasi proses penegakan hukumnya.”	6

Azis Syamsudin berpendapat bahwa tujuan pembentukan Pansus untuk mengawasi proses penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang terjadi di Pelindo II. Kinerja pansus lebih spesifik dari pada kinerja panitia kerja, sehingga proses penyelesaian kasus bisa lebih baik.

Tabel 4.10 Pesan Politik Anggota DPR tentang Kasus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Fadli Zon	Menuju Pansus Pelindo II	1. “Ada satu masalah perpanjangan kontrak.	8

<sup>46</sup> Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 72

			<p>Perpanjangan kontrak dengan koorporasi besar seperti itu, tentu harus melewati prosedur. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada?”</p> <p>2. “Saya sependapat dengan semangatnya. Kalau bisa dikelola sendiri Pelabuhan tersebut kenapa harus memakai orang asing? Dalam konteks ini, Presiden juga harus mempunyai semangat ke arah itu. Yang namanya konsep Trisakti jangan hanya omongan, tapi harus diterapkan.”</p> <p>3. “Orang seperti Budi Waseso menurut kacamata saya menjadi korban dari kasus ini. Walaupun disebut sebagai rotasi yang biasa, namun kita semua bukan orang bodoh dan tidak bisa dibodohi.”</p>	
--	--	--	---	--

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat bahwa kontrak konsesi yang diberikan Pelindo II kepada Mitranya itu terdapat permasalahan. Perusahaan asing asal Hongkong tersebut dipercaya mengelola terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok hingga 2038. Fadli menyayangkan kontrak diberikan tanpa mengindahkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tabel 4.11 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Agus Hermanto	Kita Tunggu Hasil Kerja Panja	“Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR sangat ditunggu hasilnya. Dugaan pelanggaran hukum dalam kontrak konsesi pelabuhan yang selalu menjadi sorotan masih menunggu pembuktian. Bila ada pelanggaran hukum dan etika yang ditemukan Panja, sebaiknya diserahkan pada institusi yang berwenang.	9

			Dengan begitu, langkah Panja lebih proporsional.”	
--	--	--	---	--

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritisi bahwa Panja bentukan Komisi VI sangat ditunggu hasil kerjanya, karena dugaan pelanggaran hukum dalam kontrak konsesi tersebut perlu diselesaikan.

Tabel 4.12 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Achmad Hafidz Tohir	Kerja Perdana Panja Pelindo II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino memperpanjang konsensi pengelolaan terminal peti kemas, Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding (HPH), patut diduga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena mengabaikan otoritas pemerintah di Pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH.”</li> <li>2. “Menteri Perhubungan saudara Jonan sudah menyatakan menolak, tapi RJ Lino tetap ngotot dengan alasan Jamdatun Kejangung membolehkan dalam pendapat hukumnya,”</li> </ol>	10
2	Heri Gunawan	Kerja Perdana Panja Pelindo II	<p>“Di Pasal 344 UU No.17/2008 disebutkan tiga tahun setelah UU ini berlaku, maka semua perusahaan Pelabuhan harus merujuk pada UU ini. Jadi, 2011 dimulai pemberlakuan. Seharusnya Pelindo II menggunakan prosedur UU tersebut untuk meminta hak konsesi. Ironisnya, nilai kontrak yang diteken Pelindo II dengan Hutchitson tersebut jauh lebih kecil dibanding konsesi pertama. Padahal, produktivitas JICT naik terus dan meningkat,”</p>	11

Achmad Hafiz Tohir dan Heri Gunawan memiliki pendapat yang sama yaitu mengenai tidak diberlakukannya ijin Konsesi sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku. Dijelaskan bahwa Rj Lino selaku direktur utama Pelindo II tetap mempertahankan pendapatnya bahwa kasus perpanjangan sudah sesuai prosedur.

Tabel 4.13 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Azam Azman	Ada Disharmoni di Pelindo II	“saya menilai, Dirut Pelindo II RJ. Lino selain diduga melanggar UU Pelayaran, juga kerap jalan sendiri tanpa mengindahkan otoritas pelabuhan dalam menjalani usaha kepelabuhan. Bahkan, dengan Dewan Komisaris Pelindo II pun tak klop. Panja Pelindo II bertanya-tanya soal disharmoni yang terjadi di perusahaan plat merah itu.”	12

Anggota komisi VI DPR RI Azam Azman menilai bahwa direktur utama Pelindo II RJ Lino dalam memimpin perusahaannya sering tidak mengindahkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga, perpanjangan kontrak Pelindo II dengan mitranya mengalami masalah ijin konsesi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah berlaku.

Tabel 4.14 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Bambang Haryo Soekartono	Tak Perlu Takut Tanpa Keterlibatan Asing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Pelabuhan ini bukan pelabuhan transit seperti di Singapura. Jakarta tidak punya pesaing dengan negara manapun. Beda dengan Singapura yang bersaing dengan Malaysia dan Thailand,”</li> <li>2. “Kita tidak perlu takut bersaing dengan pelabuhan negara lain, walau tak bekerja sama dengan asing dalam pengelolaannya. Kita juga tak perlu sibuk cari pasar, karena sudah ada pasarnya. Jadi, sayang sekali jika pengelolaan</li> </ol>	14

			<p>Pelabuhan dikerjasamakan dengan asing. Pelindo III di Surabaya sudah membuktikannya,”</p> <p>3. “Ini yang saya tekankan kepada Pelindo untuk lebih profesional meningkatkan produksi secara maksimal. Semua pelabuhan di wilayah pesisir adalah potret muka bangsa dan negara. Untuk itu, harus bisa dimunculkan potret yang baik dan ramah, agar masyarakat dunia pelayaran senang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia,”</p> <p>4. “Jika ini dibuat satu kontrak baru, Hutchison harus memberikan nilai konsesi kepada Pelindo, dua kali lipat lebih tinggi daripada yang lalu. Tetapi mengapa sekarang lebih kecil? Ini perlu didalami oleh Panja,”</p> <p>5. “Mumpung kontrak ini belum berjalan terlalu jauh dan bayarnya masih menciil. Uang Pelindo cukup banyak untuk mengembalikan ganti rugi kepada Hutchison.”</p>	
--	--	--	---	--

Komisi VI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi bahwa tanpa bantuan asing pun pengelolaan Pelabuhan bisa dilakukan oleh putra-putri bangsa sendiri. Keuntungan dari pengelolaan itu bisa bermanfaat bagi pemasukan bangsa Indonesia. Bambang Haryo menyayangkan Rj Lino tetap memperpanjang kontrak Kerjasama dengan HPH.

Tabel 4.15 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
----	------	-------	---------------	---------

1	Sartono Hutomo	Infrastruktur Pelabuhan Indonesia Masih Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Rendahnya rating pelabuhan Indonesia tidak terlepas akibat pelayanan bongkar muat barang yang tidak efektif dan efisien,”</li> <li>2. “Peraturan tersebut mengatur Pelindo sebagai operator terminal, bukan mengembangkan bisnis di luar itu. Anehnya, Dirut Pelindo II terus menabrak aturan ini dengan nilai konsesi yang juga timpang,”</li> <li>3. “Hal ini juga ditunjang dengan total aset sebesar Rp 25 triliun. Tentu hal ini perlu kita apresiasi,”</li> <li>4. “Penting kiranya bagi setiap anak bangsa untuk bersama-sama bahu membahu menjaga tren ekonomi kita yang selama 10 tahun berkembang secara positif. Kita hilangkan buruk sangka dan saling menjatuhkan, kita saling bersinergi antar elemen bangsa,”</li> </ol>	15
---	----------------	--	--	----

Sartono Hutomo melihat bahwa rendahnya rating Pelabuhan di Indonesia karena pelayanan bongkar muat barang yang kurang efisien. Anggota komisi VI ini menilai bahwa peringkat kualitas infrastruktur Indonesia berada dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sartono berharap bahwa setiap anak bangsa ikut bekerjasama menjaga dan membangun citra positif bagi bangsa Indonesia.

Tabel 4.16 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
----	------	-------	---------------	---------

1	Irma Suryani	Direksi Pelindo II Tak Hormati Komisi IX	<p>1. “Permasalahan PT. Pelindo II, bak benang kusut. <i>Jakarta International Container Terminal (JICT)</i> yang merupakan anak perusahaan PT. Pelindo II kini sedang menjadi sorotan tajam publik, karena dibelit berbagai kasus, baik dugaan korupsi <i>dwelling time</i>, pengadaan mobil <i>crane</i>, dan PHK para pekerjanya.”</p> <p>2. “Irma menyerukan agar tak ada lagi PHK dan mutasi pekerja di PT. Pelindo II. Hal ini penting agar tak ada kegaduhan di tengah pengusutan yang dilakukan Panja Komisi IX dan penyidikan oleh Bareskrim Polri.”</p>	16
---	--------------	--	---	----

Komisi IX bersama Irma Suryani menilai bahwa kasus Pelindo II ini seperti benang kusut karena Pelindo II saat ini lagi menjadi sorotan publik karena dibelit berbagai kasus, baik dugaan korupsi *dwelling time*, pengadaan mobil *crane*, dan PHK para pekerjanya

Tabel 4.17 Pesan Politik Anggota DPR tentang Pansus Pelindo II

No	Nama	Judul	Pesan Politik	Halaman
1	Wilgo Zainar	Perpanjangan Konsesi JICT Perlu Dipertanyakan	<p>1. “Saya kira kalau ini adalah perpanjangan kontrak yang merupakan kontrak jilid ke-2, namun penandatanganan kontrak belum habis, itu kita memang perlu konfirmasi langsung ke Direksi PT Pelindo II. Untuk nilai kontrak kedua yang lebih kecil dibanding nilai kontrak yang pertama, tentu kita</p>	18

			<p>juga perlu konfirmasi dan klarifikasi,”</p> <p>2. “Jadi, kalau nilai kontrak ini lebih kecil, tentu menjadi pertanyaan besar. Mengapa Pelindo II memberikan kemurahan dalam memberikan nilai kontrak dan kemudahan dalam mendapatkan kontrak perpanjangan,”</p> <p>3. “Soal potensi penerimaan negara jika JICT dikelola sendiri yang bisa mencapai USD 160 juta, ini sangat luar biasa sekali. Itu bisa membuat sarana di Pelabuhan daerah lain, investasi dari hasil pendapatan itu,”</p> <p>4. “Saya berharap, dengan adanya Panja dan Pansus Pelindo II ini, khususnya kinerja keuangan yang memberikan kontribusi kepada pendapatan negara, ke depannya bisa dioptimalkan kembali. Kita mendukung seluruh BUMN menjadi <i>cash flow</i> untuk penerimaan negara sebagai <i>backbone</i> bangsa ini,”</p> <p>5. “Saya kira, putera-puteri Indonesia sanggup mengelolanya. Namun dengan catatan, ada <i>political will</i> dari Pemerintah, kepada BUMN, untuk memberi kepercayaan kepada putera-puteri Indonesia mengelola JICT. Kita harus menggali sumber daya yang ada di bangsa ini,”</p>	
--	--	--	--	--

2	Mohammad Hatta	Perpanjangan Konsesi JICT Perlu Dipertanyakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ketika Presiden Joko Widodo membicarakan masalah <i>dwelling time</i> ini, Komisi XI DPR sudah lama membahasnya, karena ini terkait bea masuk. Seperti tidak ada keseriusan dalam menangani ini. Penyelundupan terjadi terus menerus,”</li> <li>2. “Importir sekarang, dalam tanda kutip mulai bersih. Selama ini mereka kongkalikong terkait perkontaineran, dan lain sebagainya. Sekarang mereka harus membayar sesuai dengan <i>harmony code system</i>. Barang impor apapun, harus membayar bea masuk. Ini yang kita harapkan,”</li> <li>3. “Sehingga, ini bukan hanya masalah waktu tunggu bongkar muat saja, tapi juga bea masuk lebih tertib,”</li> </ol>	19
---	----------------	---	---	----

Anggota Komisi IX Wilgo Zainar menilai bahwa investasi yang sudah dilakukan perpanjangan, berarti sudah mendapatkan *return of investment* dari investor tersebut. Seharusnya nilai kontrak untuk berikutnya jauh lebih besar. Wilgo melihat adanya *lost income* dari kontrak tersebut.

Sementara itu, anggota komisi XI Mohammad Hatta melihat permasalahan ini sebenarnya sudah kasus lama di Pelindo II termasuk potensi *lost income* yang terjadi akibat lamanya bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dikabarkan mencapai *lost income* sebesar 780 Triliun.

Peneliti melihat bahwa pesan politik oleh anggota DPR RI yang disampaikan melalui majalah Parleментарia dikemas melalui rubrik dan judul membahas mengenai kinerja panja menuju pansus Pelindo II bahwa kasus perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh Rj Lino tidak sesuai dengan UU yang

berlaku, sehingga masyarakat sebagai pembaca menjadi paham hasil pembahasan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI tentang kasus Pelindo II.

#### 1. Penentuan Teknik penyampaian pesan

Teknik penyampaian pesan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI adalah melalui redaktur media cetak. Majalah Parlementaria dikelola oleh tim redaktur media cetak. Redaktur media cetak yang berada dibawah naungan ketua sekjen DPR RI dan dibantu oleh biro pemberitaan parlemen. Dalam biro tersebut diatur standart operasional mengenai standart penulisan dan penyusunan pemberitaan.

##### A. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan pembuatan berita adalah tim redaktur media cetak DPR RI dan redaktur foto bagian dokumentasi foto, audio visual, warna.
2. Penanggung jawab pembuatan berita adalah kepala sub bagian media cetak dan kepala biro pemberitaan parlemen
3. *Output* pemberitaan adalah dokumentasi naskah, foto, kegiatan Anggota DPR RI yang membahas dan berbicara mengenai kasus Pelindo II

#### 2. Penggunaan media

Anggota DPR RI menggunakan media majalah parlementaria dalam menyebarkan pesan politiknya yaitu berupa foto, naskah, dan judul yang ditulis di majalah parlementaria terbitan September 2015. Karena didalam terbitan tersebut membahas secara spesifik mengenai kasus Pelindo II. Anggota DPR RI melaksanakan komunikasi politiknya menggunakan strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik adalah menggunakan majalah parlementaria untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya yang dikelola oleh tim biro pemberitaan parlemen.

Peneliti melihat bahwa penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh anggota DPR RI dikelola oleh redaktur media cetak. Pesan politik dikemas dalam sebuah artikel pemberitaan yang berisi judul, foto, dan rubrik. Selain itu, penggunaan media majalah parlementaria sebagai strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik merupakan strategi penyampaian pesan politik kepada masyarakat secara luas menggunakan media majalah Parlementaria yang dikelola langsung oleh biro pemberitaan parlemen.

#### 4.8 Komunikasi Organisasi

Organisasi membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan majalah parlementaria. Majalah parlementaria disusun tiap tahunnya sebanyak 12 terbitan. Majalah parlementaria ini merupakan salah satu turunan arsip media di DPR RI. Majalah parlementaria dikelola oleh deputi bidang persidangan tepatnya biro pemberitaan parlemen.

Kedudukan biro pemberitaan parlemen berada dibawah naungan sekretariat jendral DPR RI untuk memberikan dukungan kepada Sekjen dalam memberitakan penyampaian pesan melalui media yang dimiliki oleh DPR. Biro pemberitaan parlemen membantu Sekjen untuk mengelola komunikasi politik, pengelolaan isu politik, dan penyampaian informasi analisis data kepada masyarakat. Didalam biro pemberitaan parlemen dibagi menjadi 4 bagian media yaitu **1)** Bagian media cetak, **2)** bagian hubungan masyarakat, **3)** bagian televisi dan radio parlemen, **4)** bagian penerbitan. Majalah parlementaria masuk kedalam bagian media cetak.

Bagian media cetak bertanggung jawab kepada Biro pemberitaan parlemen untuk menyusun sebuah naskah berita sehingga menjadi naskah berita yang valid. Berikut alur pembuatan berita sehingga berita tersebut dapat dimuat didalam majalah Parlementaria:

Tabel 4.18 Alur Pembuatan berita

No	Kegiatan	Deputi	Karo	Kabag	Kasubag	Reporter
1	Mengarahkan Pemberitaan Karo untuk melakukan peliputan berita media cetak.	Deputi	Karo			
2	Menugaskan media cetak dan media sosial untuk : 1. Melakukan koordinasi dengan Kasubag Media Cetak 2. Menugaskan Kasubag media cetak untuk			Kabag		

	melaksanakan peliputan berita				Kasubag	
3	Menugaskan reporter untuk melaksanakan peliputan berita					Reporter

Sumber : SOP Reporter Media Cetak

Peneliti melihat bahwa deputi perlementaria memiliki kuasa sebagai wakil untuk bertindak mengarahkan karo pemberitaan untuk membuat berita di majalah parlementaria. Setelah karo mendapatkan tugas untuk meliput berita, karo pemberitaan mengarahkan kepala bagian media cetak untuk melakukan koordinasi dengan kepala sub bagian media cetak tentang topik berita yang mau dimuat. Berikutnya kepala sub bagian media cetak menugaskan reporter untuk memulai meliput sebuah berita. Jadi, penulis menemukan bahwa komunikasi organisasi yang terjadi di dalam pemberitaan di parlementaria termasuk komunikasi organisasi secara internal karena terjadi komunikasi antara deputi sampai dengan reporter yang melakukan tugas untuk membuat berita.

#### 4.9 majalah parlementaria

Majalah Parleментарia merupakan salah satu media yang dikelola oleh Biro Pemberitaan Parlemen yang dipublikasikan di website DPR RI. Sesuai dengan strukturnya yang telah ditetapkan pada peraturan SekJen DPR RI Nomor 6 tahun 2015, majalah parlementaria dikelola oleh subbagian pemberitaan media cetak dan media sosial. Isinya secara umum meliputi program/kebijakan DPR RI, beserta kasus yang ada di DPR RI. Majalah ini disajikan dengan gaya penulisan yang bersifat feature serta dipadukan dengan desain yang dinamis dan berwarna.

Majalah Parleментарia pertama kali hadir pada tahun 2008. Semenjak pertama kali hadir, majalah parlementaria mulai bisa ditemukan *online* melalui website DPR atau *offline* di beberapa lokasi seperti stasiun, bandara, dan instansi pemerintah lainnya. Majalah parlementaria diterbitkan setiap bulan sebanyak 1 edisi, edisi pertama dibulan Januari hingga edisi terakhir dibulan Desember. Sehingga, majalah parlementaria memiliki 12 edisi di setiap tahunnya.

Susunan redaksional Majalah Parleментарia terdiri dari:

1. Pengawas umum : pimpinan Dpr Ri
2. Ketua pengarah : Ir. Indra Iskandar, M.Si (SekJen DPR RI)
3. Wakil ketua pengarah : Dra.Damayanti,M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
4. Pimpinan redaksi : Drs.Mohammad Djazuli,M.Si(Kabag Media Cetak)
5. WK pimpinan redaksi: Sugeng Irianto,S.Sos.,M.A. (Kasubag Media Cetak), Suciati, S.Sos.(Kasubag Media Analisis), Nita Juwita,S.Sos.(Kasubag MedSos dan Website)
6. Redaktur : Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S. Ikom, dan Sofyan Efendi
7. Pimpinan penerbitan : Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)
8. Penanggung jawab produksi: Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
9. Staff produksi : Subadri, S.E, Barliansyah
10. Desain Grafis : Dito Sugito
11. Photographer art : Friederick Munchen
12. IT media digital : Muhamad Hendar Assifa, S.Kom
13. PJ Distribusi : Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
14. Koordinator distribusi : Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa
15. Admisi staf distribusi : Arif, Lamin, Yuliana Puspita<sup>47</sup>

Majalah Parleментарia memiliki 19 rubrik yang membahas seputar, kebijakan, program kerja, serta kegiatan anggota DPR RI. 19 rubrik tersebut terdiri dari :

Tabel 4.19 Rubrik dan Cakupan Isi Majalah Parleментарia

No	Rubrik	Cakupan Isi
1	Prolog	berisi kata pengantar dari redaksi majalah parlementaria
2	Laporan utama	membahas mengenai berita dan tema yang ada di majalah tersebut
3	Sumbang saran	berisi mengenai tokoh atau masyarakat yang memberi kiritik atau saran terhadap kinerja DPR RI atau kasus yang ada didalamnya
4	Pengawasan	berisi tugas dan wewenang anggota dpr mengenai kasus atau pemberitaan tersebut
5	Anggaran	berisi tugas dan wewenang DPR RI dalam mengawasi anggaran dan pengeluaran pemerintah
6	Legislasi	berisi tugas dan wewenang anggota DPR dalam menangani kasus atau pemberitaan tersebut
7	Foto berita	berisi mengenai foto berita yang dimuat dalam edisi majalah tersebut
8	Profil	berisi Riwayat hidup seorang tokoh
9	Kunker	berisi mengenai kunjungan kerja anggota DPR ke berbagai wilayah

<sup>47</sup> Majalah parlementaria edisi 194 tahun 2021, hal 2

10	Sorotan	berisi mengenai kasus yang perlu diperhatikan (ter-update)
11	Liputan khusus	berisi informasi berita yang dibahas khusus didalam satu liputan
12	Dapil	berisi informasi daerah pilihan anggota dan komisi DPR
13	Tokoh	berisi biodata tokoh dan Riwayat hidupnya
14	Pernik	berisi artikel ringan yang dikemas dalam suatu pemberitaan
15	Parlemen dunia	membahas mengenai parlemen yang berada didunia terkadang berisi kunjungan kerja anggota dan komisi DPR RI
16	Kiat sehat	berisi artikel yang membahas mengenai tips hidup sehat
17	Wisata	berisi mengenai info destinasi wisata di Indonesia
18	Hobi	berisi kesukaan atau kegiatan dari anggota DPR RI
19	Pojok parlemen	berisi mengenai ringkasan berita dengan Bahasan yang ringan.

Sumber : Majalah Parlementaria edisi 129

#### 4.9.1 Peran media dalam komunikasi politik

Peran media majalah parlementaria dalam komunikasi politik anggota DPR memiliki enam peran dasar sebagai suatu sub system dari sebuah system politik, yaitu :

1. penyampai informasi

majalah parlementaria berperan sebagai penyampai informasi dari DPR RI kepada masyarakat Indonesia mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR RI, adanya beberapa kasus yang ada, maupun kasus yang menimpa direktur utama Pelindo II. Penyampaian informasi pada majalah parlementaria dapat dilihat dari foto, artikel, dan rubrik yang dituliskan di majalah parlementaria tersebut.

2. Penyalur Aspirasi

Pada majalah parlementaria terbitan edisi 129 terdapat rubrik aspirasi dari masyarakat ada yang memberikan masukan dan ada juga yang memberikan komentar atau kritik terhadap kinerja DPR RI. Berikut rekapan aspirasi dari masyarakat di majalah parlementaria edisi 129 :

Tabel 4.20 Aspirasi masyarakat terhadap DPR RI

NO	Judul	Komuikator politik
1	Menolak Rencana Pengajuan pembaharuan AMDAL	Agus Rismalan Nor, anggota LSM Peduli TanaH Air (PETA) Kalimantan Selatan.

2	Surat terbuka tentang permasalahan pajak akik	Abdurrahman sihombing, ketua front persatuan pedagang pajak akik Medan.
3	Penolakan pembangunan bandara adonara	Anton susang lamablawa, anggota generasi muda penerus suku lamblawa (GMPSLB) Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
4	Permasalahan dan penyelamatan PT. Kertas Leces (PERSERO)	Muji slamet, wakil dari Serikat Pekerja Pembuat Perjanjian Kerja Bersama (SPPKB), Probolinggo Jawa Timur
5	Keinginan mewujudkan pakaian dinas TNI Jilbab	Yunianto S.Y, berbah Yogyakarta
6	Pandangan mengenai penjualan asset negara dan banjir Jakarta	H. Tb. Muslim, Bandung Jawa Barat

Sumber : majalah Parlementaria edisi 129

Majalah parlementaria dapat sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada DPR RI. Karena adanya komentar dan artikel berisi keluhan, saran, dan kritik terhadap kinerja DPR RI.

### 3. Penghubung pemerintah dan rakyat

Majalah parlementaria digunakan sebagai penghubung antara DPR RI dan masyarakat. Anggota DPR RI melakukan komunikasinya melalui artikel yang dituliskan di majalah tersebut. Sedangkan masyarakat melalui rubrik aspirasi melakukan komunikasi terhadap DPR.

### 4. Umpan Balik

Majalah parlementaria yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Majalah parlementaria telah menjadi sarana umpan balik karena adanya umpan balik dari rakyat, yaitu dengan memberi saran atas kasus Pelindo II di edisi 129. Peran umpan balik berisi artikel sumbang saran dari masyarakat yang ada pada kasus Pelindo II tersebut. Rubrik sumbang saran selalu ada di majalah parlementaria tersebut. Berikut saran masyarakat mengenai kasus Pelindo II di majalah parlementaria terbitan 129 :

Tabel 4.21 Sumbang saran majalah parlementaria edisi 129

No	Nama	rubrik	Judul	Isi pesan
1	Dr. Agus Yoni dan Fikri Tamau, M.Si (peneliti ahli CEPP FISIP UI	Sumbang saran	Pelindo dan silang sengkaret Pelabuhan di Indonesia	Membahas mengenai buruknya infrastruktur

				transprtasi dan tingginya biaya logistik, serta kritik terhadap kasus dwelling time di Pelabuhan Indonesia.
--	--	--	--	---

Sumber : majalah Parlementaria edisi 129

#### 5. Sosialisasi politik

Majalah parlementaria sebagai media sosialisasi politik dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan kebijakan oleh DPR RI. Dalam majalah parlementaria terdapat rubrik pojok parlemen yang berisikan kunjungan kerja anggota komisi X di kelurahan Lowu-lowu kota baubau. Acara ini dipimpin oleh wakil ketua komisi X Ridwan Hisjam untuk berdiskusi Bersama masyarakat setempat untuk diadakannya pembangunan GOR. Peran sosialisasi politik terdapat unsur edukasi yang memberikan pengertian-pengertian kepada rakyat mengenai pembangunan GOR tersebut.

#### 6. Kontrol sosial

Majalah parlementaria dapat sebagai kntrol sosial karena setiap edisi membahas mengenai kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Dengan melakukan kunjungan kerja, masyarakat dapat mengawasi dan melihat agenda yang dilakukan oleh anggota DPR RI secara bertahap dan menyeluruh diberbagai daerah pilihannya. Peran kontrol sosial berisikan pesan yang berpengaruh untuk mengontrol anggota DPR RI melalui kunjungannya. Berikut rekapun kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPR RI :

Tabel 4.22 rekapun kunjungan kerja anggota DPR RI di majalah edisi 129

No	Judul	Komunikan	Isi pesan
1	Dari Makassar ke Mandeh pantau prasarana olahraga dan kepariwisataan	Sekda Prov Sulsel Abdul Latief, kadispora Syamsudidin umar	“Ini ada peluang masuk di anggaran tambahan yang diminta oleh Kemenpora, kalau ini ada maka teman-teman di Komisi X siap memperjuangkan,”

2	Mengunjungi obyek wisata mandeh	Erdison, PLH kabupaten Pesisir Selatan	“Pembkab akan mengembangkan dermaga di kawasan wisata Mandeh, untuk tempat kapal kecil atau sedang, bagi wisatawan dan juga penginapan”.
3	Pemprov harus tangani maraknya kekerasan anak	Ana Veridiana, kepala Badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana (BP3AKB)	“pihaknya menemukan banyak praktik kawin kontrak di daerah Singkawang, kemudian melahirkan anak tanpa ayah. Hingga akhirnya hak anak terabaikan, bahkan tidak sedikit terjadi kekerasan terhadap anak”
4	Aspirasi daerah harus diakomodir dalam penyusunan RUU	Heru Sudjatmono, Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ini merupakan kesempatan baik yang diberikan kepada Pemprov untuk menyampaikan pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi atau masalah-masalah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, “Saya berharap bisa memberikan partisipasi yang sebaikbaiknya. Ini suatu kehormatan dan bisa dijadikan kesempatan,“
5	DPR minta Kapolda Jatim usut tuntas kasus lumajang	Irjen Anton Setiadji, Kapolda Jatim  As’at Malik, Bupati Lumajang	“Kami nanti akan mendalami dalam penyidikan, termasuk apakah ada perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal ini,”  “jika penambangan pasir Kades Hariyono diatas kawasan konsensi milik PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) untuk penambangan pasir besi (galian B). Namun, lanjutnya, sejak tahun 2014, IMMS tidak menambang lagi karena terbentur pada pelaksanaan UU Minerba.”

Sumber : majalah Parleментарia edisi 129

Berdasarkan data temuan diatas, peneliti melihat bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPR RI ke daerah pilihannya merupakan suatu penghubung antara anggota DPR dengan masyarakat yang berada disekitar kunjungan kerjanya. Melalui tokoh masyarakat setempat, aspirasi masyarakat

diwakilkan untuk disampaikan kepada anggota DPR RI yang melakukan kunjungan tersebut. Sehingga, masyarakat dapat mengawasi dan melihat agenda yang dilakukan oleh anggota DPR RI di wilayahnya.

#### 4.10 Manajemen Media

Manajemen media, lebih spesifik membahas mengenai strategi perusahaan dalam mengelola bisnis media. Menurut Kasubbag media cetak bapak Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.<sup>48</sup> membahas mengenai mekanisme atau tahap-tahap pra produksi hingga distribusi yang dilakukan pada majalah Parlementaria. Berdasarkan hasil wawancara, tahap-tahap yang dilakukan oleh pengelola majalah parlementaria dari pra produksi hingga produksi adalah :

1. Deputi mengarahkan Karo Pemberitaan untuk melakukan peliputan berita media cetak.
2. Karo menugaskan Kabag Media Cetak dan Media Sosial untuk melakukan koordinasi dengan kasubag media cetak.
3. Kasubbag menugaskan reporter untuk melakukan peliputan berita. Berikut Langkah-langkah penyusunan berita yang akan dimuat dalam majalah parlementaria di SOP Reporter Media Cetak :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		DEPUTI	KARO	KABAG	KASUBAG	REPORTER	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan Karo Pemberitaan untuk melakukan peliputan berita media cetak.	Deputi	Karo							
2	Menugaskan Kabag Media cetak dan media sosial untuk : 1. Melakukan koordinasi dengan Kasubag Media Cetak 2. Menugaskan Kasubag media Cetak untuk melaksanakan peliputan berita			Kabag	Kasubag					
3	Menugaskan reporter untuk melaksanakan peliputan berita.					Reporter	1. Voice Recorder 2. Notes 3. Alat Tulis 4. Alat			

Gambar 4.2 SOP Reporter Media Cetak

peneliti melihat bahwa Deputi sebagai kedudukan tertinggi mengarahkan Karo pemberitaan untuk membuat naskah berita yang akan dimuat di majalah

<sup>48</sup> Wawancara online tanggal 25 Agustus 2021

Parlementaria. Sehingga naskah dapat diliput oleh reporter media cetak untuk setiap edisinya.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		DEPUTI	KARO	KABAG	KASUBAG	REPORTER	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	Format penulisan berita mengacu kepada kaidah jurnalistik 5w 1h yaitu: a. <i>What</i> b. <i>Where</i> c. <i>When</i> d. <i>Who</i> e. <i>Why</i> f. <i>How</i>						Pengolah Data Rumus baku penulisan			
5.	Langkah-langkah: 1. Mencari informasi 2. Mengumpulkan informasi yang memiliki nilai berita 3. Membuat dan menyusunnya menjadi suatu berita 4. Memuat berita di media internal DPR RI (Majalah dan Buletin)						1. 60 menit 2. 30 menit 3. 30 menit 4. 15 menit	Berita	Dalam 1 hari reporter membuat minimal 3 berita	
6.	Nilai berita: a. Magnitude: Bagaimana suatu peristiwa memiliki dampak yang meluas. b. Signifikan:								Penilaian suatu berita layak/tidak dilakukan oleh Redaktur Berita	

Gambar 4.3 SOP Reporter Media Cetak

Kategori naskah berita yang wajib dibuat oleh reporter media cetak DPR RI, harus mengikuti format penulisan yang benar sehingga penulisan berita dapat dipahami oleh pembaca. Setelah itu, reporter juga harus mengikuti standart langkah-langkah penulisan berita sehingga proses penulisan berita dapat tersusun secara rapi.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		DEPUTI	KARO	KABAG	KASUBAG	REPORTER	Kelengkapan	Waktu	Output	
	a. Bagaimana itu menjadi penting bagi publik. c. Aktualitas: Tingkat aktualitas suatu berita, misal baru saja terjadi. d. Proximity: adanya kedekatan terhadap geografis dan psikologis. Misal banjir di jakarta, menarik bagi warga jakarta. e. Prominence: Tokoh atau publik figure yang terlibat. f. Dampak g. Konflik: peristiwa yang menegangkan, perang. h. Human Interest: peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan publik. i. Keanehan : unik dan tidak lazim									
7.	Melakukan reportase (pelaporan) dengan teknik wawancara, dan						30 menit	Rekam an / transkrip		

terjun langsung ke lapangan, menemui narasumber atau pun penggalian informasi.								ip
--	--	--	--	--	--	--	--	----

Gambar 4.4 SOP Reporter Media Cetak

Peneliti melihat bahwa reporter dalam membuat sebuah berita harus mengacu pada 5W+1H supaya berita yang dimuat memiliki kualitas yang baik dan bermutu. Reporter didalam membuat berita di majalah parlementaria harus membuat minimal 3 berita dalam satu hari. Selain itu, agar berita tersebut layak untuk dimuat di majalah Parleментарia reporter dalam melakukan peliputan harus memiliki landasan nilai-nilai berita yang ada di majalah Palementaria. Berikut nilai-nilai yang harus ada:

1. *Magnitude*: Bagaimana suatu peristiwa memiliki dampak yang meluas
2. *Signifikan*: Bagaimana peristiwa itu menjadi penting bagi publik.
3. *Aktualitas*: Tingkat aktualitas suatu berita, misalnya kasus yang baru saja terjadi (*hotnews*)
4. *Proximity*: adanya kedekatan terhadap geografis dan psikologis. Misalnya banjir di jakarta, menarik bagi warga jakarta.
5. *Prominence*: Tokoh atau publik figure yang terlibat.
6. *Dampak*
7. *Konflik*: peristiwa yang menegangkan
8. *Human Interest*: peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan publik.
9. *Keanehan* : unik dan tidak lazim

Setelah nilai berita tersebut dimuat dalam membuat berita, reporter melakukan wawancara kepada narasumber yang berada di lapangan untuk menambah data berita yang dimuat didalam majalah parlementaria. Sehingga, artikel berita siap dimuat dalam edisi berikutnya.